

## Secara Umum Seluruh Fraksi dapat Menerima Rancangan KUA PPAS TA 2025 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Anton Atong Sugandhi - [PANGANDARAN.PUBLIKJABAR.COM](http://PANGANDARAN.PUBLIKJABAR.COM)

Jul 20, 2024 - 15:45



PANGANDARAN JAWA BARAT - Saudara pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, secara umum seluruh Fraksi dapat menerima Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, untuk itu terkait beberapa

hal teknis dapat kita diskusikan pada tahapan berikutnya.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata saat menyampaikan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi- fraksi DPRD terhadap Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2024 bertempat di gedung Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, senin (15/07/2024).

Disampaikannya bahwa, setelah mendengar pandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan KUA PPAS, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terhadap usulan yang disampaikan dalam pandangan umum Fraksi Persatuan terkait optimalisasi BUMD, pemberdayaan ekonomi kreatif, optimalisasi kegiatan sektor ekonomi real dan peningkatan pelayanan kesehatan, tentu akan kita pertimbangkan sebagai bahan bagi kami dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Pangandaran;

Regulasi dan aktualisasi pengelolaan retribusi parkir terus kita benahi. bukan saja terkait pada objek parkir yang dikelola Pemda yang berkontribusi pada PAD, namun penertiban parkir-parkir yang dikelola di lahan swasta/non Pemda juga perlu dikelola dengan cermat, agar pajak pengelolaan parkirnya bisa kita optimalkan.

Dalam pengelolaan parkir ini, kita menjalankan dua fungsi utama, pertama fungsi budgeter untuk menarik retribusi dan pajak, fungsi kedua adalah fungsi regulatory, yaitu menata dan mengelola implementasi perparkiran agar tetap memberikan kenyamanan bagi pengguna yang akan mendorong citra pangandaran, sebagai destinasi wisata yang menyenangkan bagi setiap pengunjung;

3. Tahun 2025 adalah tahun terakhir dari rangkaian implementasi RPJMD tahun 2021-2025. Apabila kita berani objektif melihat hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran, kita sudah bisa melihat dan merasakan bahwa hasil pembangunan telah dinikmati masyarakat pangandaran.

Bukan hanya jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan lingkungan ke kampung kampung juga sudah signifikan bisa dimanfaatkan dalam kondisi yang baik. Bahkan dari catatan pemerintah pusat, kabupaten pangandaran adalah satu-satunya daerah kabupaten yang kondisi jalan mantapnya di

atas 96% di Jawa Barat.

Demikian pula dengan indeks pelayanan dasar, indeks kinerja pendidikan kita berada di 91,38% lebih tinggi dari rata-rata nasional di 87,46%. Indeks kinerja kesehatan kita di 92,17% dengan rata-rata nasional di 89,76%; dan indeks kinerja infrastruktur di 86,26% dibanding rata-rata nasional di 80,34%.

Potret kinerja tersebut bermakna bahwa apa yang kita lakukan selama ini berdampak pada pembangunan yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu keberhasilan tersebut adalah hasil kontribusi kita semua. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD, Pemerintahan Desa, tokoh-tokoh dan semua elemen masyarakat yang didukung sekaligus sejalan dalam kolaborasi dengan pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Setiap kebijakan yang kita ambil dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan sangat hati-hati dan cermat. Kita melibatkan akademisi dari lembaga-lembaga pendidikan seperti Unpad, Unibraw, UGM dan ITB. Demikian pula pendampingan yang terus dilakukan dengan BPKP serta koordinasi dan asistensi yang intens dilakukan dengan lembaga pengawasan seperti BPK. Sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan APBD kita dipastikan sejalan dengan regulasi yang ada.

Namun demikian kami pun menyadari, tidak mudah mewujudkan Pangandaran yang maju dengan sumberdaya yang sangat terbatas. Dalam rasa syukur atas pencapaian pembangunan yang telah kita lakukan sampai di titik sekarang, kami menyadari masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Hal yang paling terdampak adalah kinerja keuangan yang saat ini mengalami defisit.

Setelah kami analisis bersama dengan melibatkan akademisi, BPKP dan konsultasi dengan BPK, pilihan yang paling memungkinkan dari seluruh alternatif yang dapat kita tempuh untuk penyelesaian permasalahan tersebut adalah melalui pinjaman portofolio utang daerah. Tentu

pilihan tersebut dapat dinilai dengan subjektif dan boleh dikritisi oleh siapapun, dan kami terbuka dan menghormati segala masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif sepanjang berorientasi pada penyelesaian yang terukur dan bermanfaat bagi keberlangsungan pemerintahan dan masyarakat pangandaran.

Bagi saya, ini bukan tentang Jeje Wiradinata, saya sebentar lagi akan selesai sebagai Bupati. tapi ini tentang keberlangsungan masyarakat pangandaran. Tujuan utama kita menjadikan pangandaran sebagai kabupaten adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. mari kita berkomitmen untuk menjaga dan mewujudkan masyarakat kabupaten pangandaran yang lebih maju, sejahtera dalam bingkai persatuan dan persaudaraan "katanya".

Tambah Jeje, saudara pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, secara umum seluruh fraksi dapat menerima Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut, untuk itu terkait beberapa hal teknis dapat kita diskusikan pada tahap pembahasan selanjutnya.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas segala perhatian, semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk serta kemudahan bagi kita semua "ujarnya".

Bupati Pangandaran  
H. Jeje Wiradinata.\*  
(Anton AS)